

Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-46/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

..... 1)

SURAT TUGAS
ST- 2)

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB oleh Wajib Pajak, dengan ini kami menugaskan:

1. Nama : 3)
NIP : 4)
Pangkat/Gol : 5)
Jabatan : 6)
2. Nama : 3)
NIP : 4)
Pangkat/Gol : 5)
Jabatan : 6)

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara perseorangan/kolektif*) atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak 7) :

1. nomor surat permohonan : 8)
tanggal surat permohonan : 9)
nama Wajib Pajak : 10)
alamat Wajib Pajak : 11)
Nomor Objek Pajak (NOP) : 12)
alamat Objek Pajak : 13)
2. nomor surat permohonan : 8)
tanggal surat permohonan : 9)
nama Wajib Pajak : 10)
alamat Wajib Pajak : 11)
Nomor Objek Pajak (NOP) : 12)
alamat Objek Pajak : 13)
3. dst.

mulai tanggal 14) sampai dengan tanggal 15)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

ditetapkan di 16)
pada tanggal 17)

..... 18)

..... 19)
NIP 20)

Tembusan :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Tugas.
- Angka 3 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 4 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 5 : Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 11 : Diisi dengan alamat atau nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 12 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 13 : Diisi dengan dengan alamat lokasi Objek Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian.
- Angka 16 : Diisi dengan nama kota Surat Tugas diterbitkan.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka 19 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-46/PJ/2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

..... 1)

Nomor : S- 2) 3) Sifat
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan Pengurangan PBB

Yth. 4)

.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara/yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor 5) tanggal 6) atas **) :

1. SPPT/SKP PBB *) NOP 7) (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal 8)
sampai dengan hari/tanggal 9).

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

..... 10)

..... 11)
NIP 12)

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu
- **) pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat kantor yang bersangkutan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal diajukan secara kolektif.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) (tidak perlu diisi dalam hal diajukan secara kolektif).
- Angka 8 : Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 11 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan.